

**KEDUDUKAN POLISI MILITER TNI AD DALAM MENYELESAIKAN TINDAK
PIDANA ANGGOTA TNI AD BERDASARKAN UU NO 31 TAHUN 1997
DI DETASEMEN POLISI MILITER IV/2 YOGYAKARTA
(STUDI KASUS DESERSI *IN ABSENSIA* TAHUN 2015 – 2016)**

Digna Amelia

Universitas PGRI Yogyakarta

ABSTRAK

DIGNA AMELIA. Kedudukan Polisi Militer TNI AD dalam menyelesaikan Tindak Pidana Anggota TNI AD berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta dilihat dari Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 *study kasus* pada tindak pidana desersi *in absensia* tahun 2015-2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan polisi militer dalam menyelesaikan tindak pidana desersi *in absensia* berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Subjek penelitian ini sebanyak tiga orang yang terdiri atas satu orang bidang Kaurtuud, satu orang bidang Dansat Idik, dan satu orang bidang Bamin Idik. Analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian *study kasus* ditempuh dengan strategi triangulasi data yaitu dengan analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa: 1. Polisi Militer melalui tugas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana militer bertugas sebagai penegak dan penyelenggara hukum dikalangan militer melalui tindakan penyidikan. Pada fungsi menyelesaikan tindak pidana Polisi Militer mengadakan pembinaan ataupun pelihan fisik maupun pendidikan sebagai upaya menekan tindakan anggota militer yang berlawanan dengan hukum. 2. Penyelesaian tindak pidana desersi *in absensia*, disidangkan secara sah sesuai dengan pasal 124 ayat (4) Undang-undang 31 Tahun 1997. Pelaku desersi *in absensia* dijerat dengan pasal 87 ayat 1 ke 2 Jo 2 KUHPM dengan sanksi hukuman penjara minimal 8 bulan dan dipect dari dinasny. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Militer perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara.

Kata kunci: Tugas Polisi Militer, tindak pidana desersi *in absensia*

ABSTRACT

DIGNA AMELIA. *The position of the army military police in solve the members of army who perpetrate the criminal act according to act number 31 year 1997 in military police detachment IV/2 Yogyakarta, a case study on the crime of in absensia in 2015 until 2016.*

The research aims to determine the position of military police in solving the criminal act desertion in absensia according to act number 31 year 1997 in military IV/2 Yogyakarta.

This qualitative research conducted in Military Police Detachment IV/2 Yogyakarta. The subject of this research are three people they are Kaurtud, Dansat Idik, and Bami Idik. Data analysis using three stages of data reduction, data presentation, and conciusion. Data collection in study case, methods using interview an documentation techniques the validity of data using triangulation by inductive analysis.

The results of this study showed that: 1. In the fungsion of resolving military police crimes conducting guidance or physical training as well as legal settiement of in absensia crime desertion trail lawfull in accordance with article 124 section 4 act number 31 year 1997. Perpetrators in absensia desertion snared with article 87 section 1 Jo 2 KUHPM with penal sanction at least 8 months and dismissed from his job. Law enforcement perpetrated by military police in the realization that Indonesia is a legal stage that is all fair.

Key words: the duty of military police, desertion in absensia of criminal act.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, adil dan makmur tentu sangat didambakan oleh pemerintah suatu negara di dunia termasuk Indonesia. Keadaan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya kesinambungan antar beberapa faktor pendukung dan faktor penunjang. Faktor pendukung dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai sangatlah beragam, diantaranya faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sedangkan faktor penunjang yang sangat pokok dalam menciptakan kesejahteraan tersebut, yakni faktor keamanan. Faktor keamanan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan negara guna mewujudkan kesejahteraan warga negara. Secara luas, tanggung jawab keamanan suatu negara dipengang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI yang dalam kapasitas serta proporsinya sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

Kehidupan yang aman dan damai tidak hanya berpengaruh terhadap kerukunan masyarakat, tetapi juga mengarah pada pertahanan dan keamanan negara. Kehidupan militer, kerukunan antaranggota maupun instansi militer sangat berpengaruh pada kekuatan ketahanan dan pertahanan negara. Setiap anggota TNI dituntut untuk bersih dari perbuatan pribadi yang tercela dimata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat. Hal tersebut akan menjadikan setiap anggota TNI memiliki rasa disiplin dan berkepribadian yang kuat, sehingga menjadi panutan bagi masyarakat sekitar. Kehidupan yang rukun sangat mempengaruhi ketahanan dan keamanan negara, begitupun kehidupan militer kerukunan antar anggota maupun instansi militer sangat berpengaruh pada kekuatan ketahanan dan pertahanan negara. Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela. Setiap anggota TNI merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan kesalahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pada lingkungan anggota TNI sendiri diciptakan juga aparat yang memiliki fungsi kontrol.

Apabila warga masyarakat telah memiliki POLRI yang bertugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di lingkungan TNI secara umum terdapat Polisi Militer. Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun akan mengikuti perubahan kehidupan yang modern bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perubahan yang terjadi tentunya membawa perubahan yang berdampak positif maupun perubahan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat luas. Perubahan yang terjadi akan membawa seluruh elemen masyarakat merubah dirinya masing-masing sehingga dapat menyesuaikan perilaku dirinya dengan keadaan lingkungan sekitar. Hal ini akan berpengaruh pada perilaku masyarakat yang nantinya melakukan pelanggaran terhadap suatu norma yang berlaku pada masyarakat.

Terkait dengan kejahatan yang sering dilakukan oleh anggota TNI AD, maka aparat penegak hukum militer harus mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas TNI. Penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana desersi ialah Polisi Militer Angkatan Darat. Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu penyelesaian pelanggaran tindak pidana di kalangan TNI AD. Banyaknya permasalahan kriminal yang terjadi dalam kehidupan lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan militer menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang memberlakukan hukum positif dimana pelaksanaan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Permasalahan yang sering terjadi bukan hanya sering dilakukan oleh masyarakat umum tetapi juga bisa dilakukan oleh oknum TNI, hal ini merupakan pembuktian bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Jenis metode wawancara semiterstruktur ini masuk ke dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dikatakan valid maka peneliti menggunakan teknik analisis data induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data kasus desersi *in absensia* tahun 2015

No.	Inisial	Kesatuan	Pelanggaran Pasal	No. Putusan	Hukuman	Tahun
1.	RES	Rindam IV/Dip	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2015
2.	BPW	Kodim 0709/Kbn	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2015
3.	RN	Yonif 412/R/16/2 Kostrad	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	50-K/PM.II- 11/VI/2015 22-12-2015	Hukuman Penjara 10 bulan dan dipecat dari dinas militer	2015
4.	AH	Kikavser 2/Bs	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2015
5.	K	Rindam IV/Dip	87 ayat 2 ke 2 KUHPM	70-K/PM.II- 11/AD/X/2015 04-02-2016	Hukuman Penjara 10 bulan dan dipecat dari dinas militer	2015
6.	M	Subdenpom IV/2 Pomdam IV/Dip	87 ayat 1 ke 2 KUHPM	21-K/PM.II- 11/AD/IV/2016 22-06-2016	Hukuman Penjara 5 bulan, denda Rp. 1.000.000.000 dan dipecat dari dinas militer	2015
7.	AF	Kodim 0706/Tmg	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2015
8.	SW	Akmil 01 Kodim 0707	87 ayat 1 ke 2 Jo (2) KUHPM	20-K/PM.II- 11/AD/IV/2015 29-09-2015	Hukuman Penjara 10 bulan dan dipecat dari dinas militer	2015
9.	AS	Kodim 0705	87 ayat 1 ke 2 Jo (2) KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2015

Tabel 2. Data kasus desersi *in absensia* tahun 2015 (Sumber : Arsip Detasemen IV/2 Yogyakarta)

Data kasus desersi *in absensia* tahun 2016

No.	Inisial	Kesatuan	Pelanggaran Pasal	No. Putusan	Hukuman	Tahun
1.	AS	Kodim	87 ayat 1 ke 2	Tidak ada Tembusan	Tidak ada Tembusan	2016

		0705	Jo 2 KUHPM	Pengadilan	Pengadilan	
2.	BPU	Rindam IV/Dip	87 ayat 1 ke 2 Jo 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
3.	YP	Yonarmed 3/105	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat (2) KUHPM	22-K/PM.II- 11/AD/V/2016 23-11-2016	Hukuman Penjara 10 bulan dan dipecat dari dinas militer	2016
4.	Y	Bant Yonif 412/R/6/2 Kostrad	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	30-K/PM.II- 11/AD/V/2016 23-11-2016	Hukuman Penjara 10 bulan dan dipecat dari dinas militer	2016
5.	W	Kodim 0708/Pwr	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
6.	BPW	Kodim 0709/ Kbm	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
7.	IAS	Yonif 403/Wp	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
8.	DS	Yonif 403/Wp	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
9.	T	Indam IV/Dip	87 ayat 1 ke 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
10.	AD	Korem 072/Pmk	87 ayat 1 ke 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
11.	BPU	Rindam IV/Dip	87 ayat 1 ke 2 Jo 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
12.	M	Kodim 0708/Pwr	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
13.	WYAI	Rayonarm ed 3	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016
14.	ES	Yonif 403/Wp	87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 KUHPM	Tidak ada Tembusan Pengadilan	Tidak ada Tembusan Pengadilan	2016

Tabel 3. Data kasus desersi *in absentia* tahun 2016 (Sumber : Arsip Detasemen IV/2 Yogyakarta)

Berdasarkan kajian tentang Kedudukan Polisi Militer TNI AD dalam menyelesaikan Tindak Pidana Anggota TNI AD berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta *study kasus* pada tindak pidana desersi *in absentia* tahun 2015-2016. Maka, pada dasarnya seorang anggota TNI AD merupakan manusia biasa yang mungkin saja melakukan kesalahan dalam praktik kehidupan, tentunya anggota TNI AD apabila melakukan suatu pelanggaran yang sifatnya melawan hukum tentu akan diproses secara hukum dan mendapat sanksi atas tindakannya. Penegakan hukum di kalangan anggota TNI AD diselenggarakan oleh Polisi Militer, yang mana dalam penyelesaiannya:

1. Polisi Militer melalui tugas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana militer bertugas sebagai penegak dan penyelenggara hukum di kalangan militer melalui tindakan penyidikan. Pada fungsi menyelesaikan tindak pidana Polisi Militer mengadakan pembinaan ataupun pelatihan fisik maupun pendidikan sebagai upaya menekan tindakan anggota militer yang berlawanan dengan hukum.
2. Penyelesaian tindak pidana desersi *in absentia*, disidangkan secara sah sesuai dengan pasal 124 ayat (4) Undang-Undang 31 Tahun 1997. Pelaku desersi *inabsensia* dijera dengan pasal 87 ayat 1 ke 2 Jo 2 KUHPM dengan sanksi hukuman penjara minimal 8 bulan dan dipect dari dinasny.

Polisi Militer, dalam hal menyelesaikan tindak pidana berkedudukan sebagai penyidik dalam menindak suatu kasus pidana yang bertugas untuk mengumpulkan keterangan pelaku, barang bukti maupun saksi serta melakukan penangkapan ataupun penyitaan pelaku berdasarkan surat perintah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Militer perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara (*equality before the law*). Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-empat yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Corporation Artikel. 2009. *Awal Berdirinya Polisi Militer di Indonesia*, (Online), (http://www.narifcorp.blogspot.com/2009/04/polisimiliter_.html, diunduh 25 Desember 2016).
- Babinkum TNI. 1950. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1950, tentang Peradilan Militer*.
- _____. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer*.
- _____. 1997. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997, tentang Disiplin ABRI*.
- _____. 1997. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer*.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPHN. 1945. *Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- Damin, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal Salam , Moch. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Tindak Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edication.
- Puspa, Yan Pramudya. 1977. *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia – Inggris*. Kanisius: Yogyakarta.
- Maleoveva. 2008. *Hukum Disiplin Militer*, (Online), (<https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/>, diunduh 10 Desember 2016).

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nawawi, Haidar. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sianturi, S. R. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum
Tentara Nasional Indonesia

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

POMDAM Jaya. 2011. *Sejarah Polisi Militer*, (Online), (<http://sejarah.kesatuan.blogspot.com/2011/09/polisi-militer.tni-ad.html>), diunduh 25 Desember 2016).